

**RILIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 - 2025
KE KANTOR WILAYAH BPN D. I. YOGYAKARTA
TANGGAL 6 – 10 DESEMBER 2024**

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan reses ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Dalam kunjungannya, DPR RI meminta BPN melakukan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, karena urusan pertanahan kerap memicu konflik di antara masyarakat. DPR pun memandang perlu dilakukan kajian untuk memperbaharui UU Pokok Agraria No.5/1960 agar pelayanan kantor pertanahan dapat maksimal menghadapi persoalan yang sifatnya kontemporer.

"Kasus Pertanahan atau perkara tanah merupakan aduan masyarakat yang dominan ditangani Ombudsman Republik Indonesia sampai saat ini. Hal ini tercermin dari penanganan konflik agraria yang diproses hampir di seluruh Kantor Perwakilan di Indonesia. Dan yang cukup menyita perhatian kita semua adalah banyaknya pengaduan masyarakat yang menyoroti kinerja BPN yang memiliki kewenangan, dan tupoksi dalam pembenahan persoalan pertanahan di Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dalam sambutannya di Yogyakarta, Jumat (6/12/2024)

Untuk diketahui, kunjungan reses Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN DIY dipimpin oleh Aria Bima dan juga anggota Komisi II DPR RI lainnya, seperti Shintya Sandra Kusuma, Andar Amin Harahap, Heri Gunawan, Ujang Bey, Fauzan Khalid, Eka Widodo, Ateng Sutisna, Iwan Kurniawan, dan Kamarudin Watubun. Kepala Kanwil BPN DIY Suwito menerima langsung kunjungan reses tersebut beserta seluruh jajarannya.

Dalam sambutannya, Aria Bima mengapresiasi digitalisasi yang sudah dilakukan oleh BPN DIY dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Digitalisasi dianggap penting sehingga pelayanan hingga pengukuran urusan pertanahan dapat lebih akurat dan presisi. Masyarakat pun dapat dengan mudah melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja dari BPN. Dengan demikian, urusan pertanahan dapat menjadi prioritas pelayanan.

Prioritas pelayanan yang baik dari BPN kepada masyarakat dalam urusan tanah juga digarisbawahi oleh Fauzan Khalid, anggota DPR RI Fraksi Nasdem. Hal itu karena urusan tanah dianggap kerap menuai konflik di masyarakat yang tak jarang hingga menyebabkan korban jiwa.

"Konflik agraria ini sering kali bisa menghilangkan nyawa orang, maka perlu menjadi perhatian," ujar Fauzan.

Sementara itu, Heri Gunawan, anggota DPR RI Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa perlu dilakukan kajian terhadap pembaruan UU pokok agraria. Menurutnya, UU Pokok Agraria tahun 1960 sudah perlu diperbaharui sehingga pemerintah dapat lebih maksimal mengatasi persoalan pertanahan kontemporer yang ada dalam masyarakat.

Adapun, Kakanwil BPN DIY Suwito menjelaskan, capaian kinerja BPN DIY dalam hal legalisasi aser & PTSL kurun waktu 2017 - 2024, yaitu 543.984 jumlah bidang tanah yang bersertipikat yang berasal dari kegiatan PTSL atau 22,49% dari jumlah buku tanah di DIY. Salah satu tantangan sekaligus isu strategis terkait pertanahan di DIY yakni dualisme peraturan perundang-undangan tentang pertanahan di DIY.

Kota Jogja, 6 Desember 2024,
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke D. I. Yogyakarta.